



**PEMERINTAH
KOTA TERNATE**

2025 -2029

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029

**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**





WALI KOTA TERNATE.
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TERNATE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

SKPD	DAG. HUKUM
1	7

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2024 Nomor 232);
8. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2025 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

SKPD	BAG. HUKUM
	

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2025–2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2025 dan berakhir pada Tahun 2029.
- (2) Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai landasan penyusunan Renja PD Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

BAB II SISTEMATIKA RENSTRA PD

Pasal 3

- (1) Penjabaran Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Penjabaran Renstra PD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui

SKPD	BAG. HUKUM
	

kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- (3) Pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 22 september 2025



Diundangkan di Ternate
pada tanggal 22 september 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025 NOMOR 628

SKPD	BAG. HUKUM
f	dy

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.4. Maksud dan Tujuan	5
1.5. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	7
2.2. Permasalahan dan Isu Strategi Perangkat Daerah.....	21
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	23
3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	23
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan	25
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	27
BAB V PENUTUP.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 7, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan merupakan dokumen yang bersifat indikatif.

Merujuk Pasal 16 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra-PD disusun dengan tahapan: (a) persiapan penyusunan, (b) penyusunan rancangan awal, (c) penyusunan rancangan, (d) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, (e) perumusan rancangan akhir, dan (f) penetapan.

Merujuk Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Dengan telah terbitnya Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate menyusun Renstra-PD Tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Ternate dalam mengawal tercapainya perencanaan dan pembangunan daerah.

RENSTRA Bappelitbangda Kota Ternate Tahun 2025– 2029 berisikan program-program kerja yang akan dilaksanakan sepanjang waktu 5 (lima) tahun kedepan. Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai Tujuan dan Sasaran yang sudah ditetapkan dalam RENSTRA Bappelitbangda Kota Ternate Tahun 2025–2029. Tercapainya Tujuan dan Sasaran RENSTRA Bappelitbangda Kota Ternate beserta Tujuan dan Sasaran satuan kerja lain, secara simultan, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Ternate.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunan RENSTRA Bappelitbangda Kota Ternate Tahun 2025-2029, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang

Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 100);
21. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
22. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2024 Nomor 232);
23. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2025 Nomor 235);
24. Peraturan Walikota Ternate Nomor 34.A Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 499.A);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Ternate, dimaksudkan untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Ternate sebagai berikut :

1. Memberikan panduan strategis bagi organisasi untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Ternate;
2. Menyediakan tolok ukur (ukuran kinerja) yang digunakan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja organisasi secara terukur;
3. Digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana operasional tahunan (Renja) dan alokasi sumber daya serta anggaran yang dibutuhkan;
4. Menjadi panduan bagi aparatur untuk menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta untuk mempermudah pengendalian dan evaluasi kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate 2025-2029 disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD), landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika Penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan alur berpikir dari dokumen Renstra Perangkat Daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Berisi informasi tentang tugas dan fungsi PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya, kelompok Sasaran Pelayanan yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan identifikasi permasalahan, mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan PD.

Bab III Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Arah Kebijakan, Berisi tentang tujuan, sasaran yang didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, Serta Strategi dan Arah kebijakan yang merupakan tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya untuk mencapai Tujuan/sasaran.

Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, Berisi tentang uraian program, kegiatan, subkegiatan yang merupakan hasil cascading dari tujuan dan sasaran.

Bab V Penutup, Berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate dipimpin oleh Kepala Badan yang membantu walikota dalam melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan, Mempunyai tugas untuk melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan;
- b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis Badan;
- c. mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah;

- d. mengoordinasikan pelaksanaan urusan bidang penelitian dan pengembangan daerah;
- e. mengoordinasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah;
- g. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di lingkup perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
- i. melaksanakan pembinaan terhadap bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh walikota untuk kelancaran tugas Pemerintahan daerah;
- k. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

2. Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi menyiapkan kebijakan teknis Sekretariat, pengoordinasian pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Badan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran Sekretariat;
- b. menyiapkan kebijakan teknis lingkup Sekretariat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian Badan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan;
- e. pengoordinasian penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Badan;
- f. pengoordinasian penyiapan data dan informasi Badan;
- g. melaksanakan pembinaan terhadap bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas Badan;
- i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

3. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Mempunyai tugas penyiapan kebijakan teknis, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- b. menyiapkan kebijakan teknis Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- c. pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- d. pengoordinasian perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- e. pengoordinasian pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- f. pengoordinasian penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- i. Pembinaan teknis perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- j. melaksanakan pembinaan terhadap bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas Badan;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Mempunyai tugas penyiapan kebijakan teknis, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. menyiapkan kebijakan teknis Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. pengoordinasian perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pengoordinasian pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. pengoordinasian penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. Pembinaan teknis perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. melaksanakan pembinaan terhadap bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas Badan;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Mempunyai tugas penyiapan kebijakan teknis, pengoordinasian, dan pembinaan perencanaan pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. menyiapkan kebijakan teknis Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

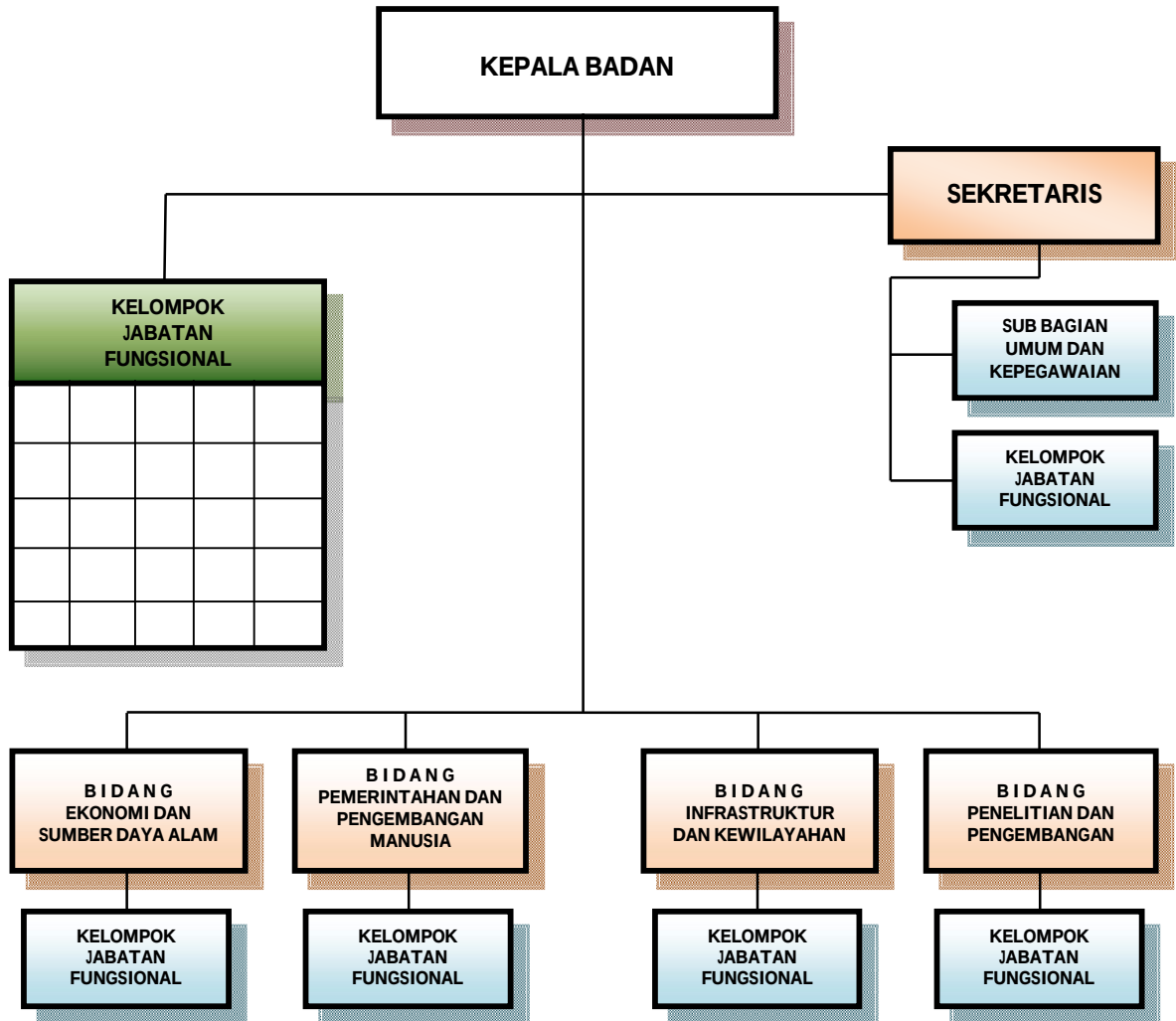
- d. pengoordinasian perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. pengoordinasian penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. Pembinaan teknis perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- j. melaksanakan pembinaan terhadap bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas Badan;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta riset dan inovasi daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud, Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. menyusun rencana kerja dan anggaran Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. menyiapkan kebijakan teknis Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah;
- e. melaksanakan pembinaan terhadap bawahan dalam pelaksanaan tugas;
- f. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas Badan;
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate



b. Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Sumber Daya Manusia

a). Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Kondisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate sampai dengan bulan Agustus 2025, yang berstatus ASN berjumlah 35 orang dan 57 orang yang berstatus Non-PNS, dengan total keseluruhan pegawai 92 orang, dengan perincian:

1. Golongan IV : 7 orang
2. Golongan III : 24 orang
3. Golongan II : 4 orang
4. Golongan I : 0 orang

Kondisi ASN berdasarkan tingkat pendidikannya sebagai berikut :

1. Strata-3 : 1 orang
2. Strata-2 : 7 orang
3. Strata-1 : 16 orang
4. Diploma-III : 1 orang
5. Diploma-IV : 2 orang
6. SMU : 8 orang

Kondisi ASN dengan jabatan Fungsional sebagai berikut :

1. Perencana Ahli Madya : 0 orang
2. Peneliti Ahli Madya : 0 Orang
3. Perencana Ahli Muda : 9 orang
4. Peneliti Ahli Madya : 0 Orang
5. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda : 1 orang
6. Perencana Ahli Pratama : 14 orang
7. Peneliti Ahli Pratama : 0 orang

Dari uraian diatas terlihat jelas bahwa ASN di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate didominasi oleh Golongan III dengan tingkat pendidikan Strata-1. Hal ini dimungkinkan mengingat struktur organisasi dan fungsi yang membutuhkan PNS dengan kualifikasi jenjang kepangkatan dan tingkat pendidikan tersebut.

Dengan demikian banyaknya staf yang meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, maka diasumsikan makin meningkat kualitas sumber daya manusia di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, sehingga diharapkan ke depan dapat memperkuat dan memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate.

b). Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Sebagaimana yang diatur ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural diharuskan melalui kegiatan Diklat Penjenjangan seperti ADUM/ADUMLA/PIM IV, SPAMA/PIM III dan SPAMEN/PIM II, maka untuk lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate, kondisi Agustus Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. SPAMEN / PIM II : 0 orang
2. SPAMA / PIM III : 2 orang
3. ADUM/ADUMLA/PIM IV : 2 orang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka eselon yang ada di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate terdiri dari :

1. Eselon II/b : 0 orang
2. Eselon III/a : 1 orang
3. Eselon III/b : 4 orang
4. Eselon IV/a : 0 orang
5. Eselon IV/b : 1 orang

2. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana Bappelitbangda Kota Ternate Tahun 2025

NO	NAMA BARANG	BANYAKNYA	KONDISI
1	Ruang Kerja Kepala	1	Baik
2	Ruang Kerja Eselon III	5	Baik
3	Ruang Kerja Pegawai	5	Baik
4	Ruang Rapat (Auditorium)	2	Baik
5	Kendaraan Roda Empat	2	Baik
6	Kendaraan Roda Dua	22	Baik
7	AC	11	Baik
8	Filing Kabinet Besi /Metal	1	Baik
10	Lemari Es	1	Baik
11	Lemari Arsip Dinamis	3	Baik
12	Portabel Generator Set	1	Baik
13	Meja Rapat	2	Baik
14	Meja Resepson	1	Baik
15	Kursi Kerja	26	Baik
16	Kursi Putar	7	Baik
17	Kursi Rapat	28	Baik
18	Kursi Pejabat Tidak Lipat	4	Baik
19	Personal Komputer	15	Baik
20	Laptop	8	Baik
21	Sofa	3	Baik
22	GPS	1	Baik
23	Mesin Gergaji	1	Baik
24	Tangga Almunium	1	Baik
25	Handucam	3	Baik
26	Scanner	1	Baik
27	Monitor	1	Baik
28	Proyektor / Infocus	3	Baik
29	Digital Audio Storage System	2	Baik
30	Mesin Hitung	1	Baik
31	Proyektor / Infocus	1	Baik
32	Micropone Podium	1	Baik
33	Mixer 16 Channel	1	Baik
34	Sound System	1	Baik
35	Spaeker Trolley	1	Baik
36	Server Komputer	1	Baik
37	Tabung Pemadam	2	Baik
38	Gorden	1	Baik
39	Karpet	1	Baik
40	Kursi Tamu	10	Baik
43	Sofa Bed	2	Baik
45	Lemari Sound System	1	Baik
46	Rak Besi	13	Baik
47	Meja	7	Baik
49	Lemari	8	Baik

50	AC Spilit 5 PK	4	Baik
51	Brangkas	1	Baik

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2025

Lokasi Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Jalan Cengkeh Afo Nomor 14 Kelurahan Maliaro Ternate, Kecamatan Ternate Tengah memberi peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus.

Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, scanner, dan lain lain) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai. Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi aset (barang dan kendaraan) terutama yang dipergunakan oleh pejabat yang sudah tidak lagi bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

c. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka jenis pelayanan yang telah dilakukan oleh Bappelitbangda Kota Ternate selama kurun waktu 2021-2024, terkait dengan Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ternate pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Capaian Kinerja IKU Bappelitbangda Kota Ternate

Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun														
			2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam perencanaan	%	22,00	17,16	78,00	19,22	17,73	92,25	19,89	19,5	98,04	20,59	19,5	94,71	21,31	18,1	84,94
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	85	95,45	112,29	100	80	80,00	100	72,88	72,88	100	85,8	85,80	100	95,35	95,35
Rata-Rata					95,15			86,12			85,46			90,25			90,14

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2025 (diolah)

Tabel 2.3
Capaian Kinerja IKK Bappelitbangda Kota Ternate

Sasaran	Indikator Sasaran	Sat.	Tahun														
			2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam perencanaan	%	22,00	17,16	78,00	19,22	17,73	92,25	19,89	19,5	98,04	20,59	19,5	94,71%	21,31	18,1	84,94
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	85	95,45	112,29	100	80	80,00	100	72,88	72,88	100	85,8	85,80	100	95,35	95,35
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	-	-		4,88	19,51	399,80	9,76	17,07	174,93	14,63	17,07	116,70	19,51	65,12	333,78
Rata-Rata					95,15			190,68			115,28			99,07			171,35

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2025 (diolah)

Berdasarkan hasil analisis terhadap kinerja sasaran `pada Badan Perencanaan Penelitian dan pengembangan Daerah “Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, yang tercantum pada tabel di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja **“Persentase Terpenuhinya Aspek Kualitas Dalam Perencanaan”**. Indikator yang dimaksud untuk mendukung perolehan Nilai SAKIP Pemerintah Kota Ternate pada komponen perencanaan kinerja sebesar 30%, Perhitungan capaian indikator tersebut dapat di lihat dari hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ternate dari tahun 2020-2024 untuk komponen **Perencanaan Kinerja** nilai rata-rata capaian pada kurun waktu 2020-2024 sebesar 89,95. Dari kesimpulan catatan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Ternate untuk komponen perencanaan Kinerja direkomendasikan untuk perbaikan dokumen perencanaan antara lain :
 - a) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan pada pemerintah daerah setiap Perangkat Daerah dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh perangkat daerah telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat serta memiliki kualitas indikator yang memenuhi kriteria SMART dan memenuhi unsur cukup dalam mengawal kinerja.
 - b) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen Cascading kinerja baik di tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah dengan memperhatikan *Logical Framework* dan *Critical Success Factor* dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Indikator Kinerja **“Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan”**, diukur dengan menggunakan formulasi jumlah hasil kelitbangan yang di tindaklanjuti dibagi dengan jumlah hasil kelitbangan yang direkomendasikan. Dari kurun waktu 2020-2024 rata-rata capaian sebesar 89,26% dari target yang telah ditetapkan. Dari kesimpulan diperlukan untuk lebih dioptimalkan lagi hasil kelitbangan dalam kebijakan pembangunan daerah, ada berbagai faktor sehingga hasil kelitbangan

belum dapat di tindaklanjuti diantaranya ketersediaan anggaran dari perangkat daerah, rekomendasi yang diajukan dalam hasil sulit diterapkan karena keterbatasan sumber daya, perubahan prioritas, serta kurangnya dukungan dari perangkat daerah yang menjadi tujuan rekomendasi.

3. Indikator Kinerja "**Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah**", diukur dengan menggunakan formulasi inovasi Perangkat Daerah yang difasilitasi dibagi Jumlah Perangkat Daerah. Dimana pada tahun 2024 dari 41 Perangkat Daerah Kota Ternate terdapat 29 Perangkat Daerah yang difasilitasi dan terdaftar pada *Inovation Government Award* (IGA). Namun dari hasil indeks inovasi daerah masih rendah yaitu sebesar 53,58 % hal ini karena inovasi belum berdampak optimal pada pelayanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

d. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Bappelitbangda Kota Ternate adalah berbagai pihak yang terkait dengan Perencanaan pembangunan daerah dan Penelitian dan Pengembangan adalah perangkat daerah, masyarakat, lembaga pemerintah lainnya, swasta, akademisi dan peneliti, yang membutuhkan informasi, partisipasi, konsultasi, dan pengawasan dalam pembangunan daerah.

Optimalnya tata kelola pemerintahan yang profesional, Inovatif dan berbasis digital dilakukan dengan penyesuaian birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, penyesuaian sistem kerja dilingkungan Bappelitbangda Kota Ternate berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Penyesuaian sistem kerja di Bappelitbangda Kota Ternate dilakukan dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan melalui :

- 1) Penugasan setiap pegawai untuk bekerja secara individu.
- 2) Penugasan setiap pegawai untuk bekerja secara tim kerja.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategi Perangkat Daerah

Permasalahan adalah suatu kondisi atau situasi yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan harapan, yang memerlukan penyelesaian atau penanganan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan.

Perumusan masalah berfungsi sebagai panduan untuk menentukan fokus dan arah penelitian. Rumusan masalah harus spesifik, jelas, dan terukur, serta dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang mencari jawaban melalui pengumpulan data dan analisis

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja pelayanan Bappelitbangda Kota Ternate, dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

1. Belum sepenuhnya tersedia data capaian pada perangkat daerah;
2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan;
3. Konsistensi perencanaan dan penganggaran masih perlu ditingkatkan;
4. Kualitas dan kuantitas SDM belum optimal;
5. Belum semua hasil penelitian ditindaklanjuti dan menjadi dasar pengambilan kebijakan; dan
6. Pengawasan inovasi belum berjalan optimal

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan.

Pemetaan Permasalahan Bappelitbangda Kota Ternate Tahun 2025-2029, maka disusun isu Strategis sebagai berikut :

Tabel 2.4
Isu Strategis Bappelitbangda Kota Ternate

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN			ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1. Perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 2. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Belum sepenuhnya tersedia data capaian pada perangkat daerah.	Meningkatkan inovasi dan penelitian ilmiah	Perkembangan Teknologi (Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat)	1. Belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, KL dan daerah, serta konsistensi pencapaian jangka Panjang 2. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai.	Tata Kelola Pemerintahan Adaptif dan Melayani dalam mendukung pembangunan dan daya saing daerah	Meningkatkan kualitas Monev. perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan.					Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah yang smart, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan
	Konsistensi perencanaan dan penganggaran masih perlu ditingkatkan					Mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam perencanaan, penganggaran, monev. Pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah
	administrasi kepegawaian perangkat daerah					Meningkatkan kapasitas Aparatur Perencana dan Peneliti
	Penelitian dan pengembangan daerah					Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah berbasis bukti (<i>evidence based policy</i>)
Riset dan inovasi daerah	Pengawasan inovasi belum berjalan optimal					Mengoptimalkan fasilitasi, pembinaan dan apresiasi terhadap inovasi daerah

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2025 (diolah)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, serta berkaitan dengan urusan pelayanan kinerja yang menjadi kewenangannya antara lain: unsur penunjang urusan pemerintahan yang terdiri dari : (1) Bidang Urusan Perencanaan dan (2) Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan, jika diintegrasikan dengan Tujuan dan Sasaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2025-2029, maka dapat diurai dalam Tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Bappelitbangda Kota Ternate

NSPK DAN Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
VISI : Mewujudkan Kota Ternate Yang Mandiri Dan Berkeadilan MISI : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif, Bersih, Transparan, Dan Akuntabel Yang Berorientasi Pada Pelayanan Publik TUJUAN : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik yang Berbasis Digital SASARAN : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan		SAKIP	B	BB	BB	BB	BB	BB
		Peningkatan Komponen Perencanaan Kinerja Dalam Nilai SAKIP	Komponen Kinerja Perencanaan (Bobot 30%)	20,21	20,77	21,44	21,69	22,2	22,63
		Peningkatan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	60	62,5	65	67,5	70	75

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2025 (diolah)

Untuk dapat mencapai tujuan renstra yang diharapkan, maka disusunlah tahapan-tahapan di dalam pencapaian renstra sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Bappelitbangda Kota Ternate

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V(2030)
Pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur Perencana dan Peneliti.	Pengembangan Sistem operasional kinerja aparatur Perencana dan peneliti dalam optimalisasi kinerja fungsi dan tugas	Penguatan Sistem operasional Kinerja aparatur Perencana dan peneliti, yang bersih (bebas KKN), kreatif, inovatif, dan responsive.	Memperkokoh Sistem operasional Kinerja aparatur Perencana dan peneliti yang bersih (bebas KKN), kreatif, inovatif, dan responsive.	Mewujudkan Sistem operasional Kinerja aparatur Perencana dan peneliti yang berkualitas dan berkelanjutan
Penyiapan Infrastruktur Perencanaan, Riset dan inovasi Daerah Berbasis Digital	Pengembangan Infrastruktur Perencanaan, Riset dan inovasi Daerah Berbasis Digital	Integrasi teknologi digital perencanaan, Riset dan inovasi Daerah dalam peningkatan efisiensi dan produktifitas penggunaan.	Memperkokoh teknologi digital perencanaan, Riset dan inovasi daerah yang berkualitas	Mewujudkan teknologi digital perencanaan, Riset dan inovasi daerah yang berkelanjutan..

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV(2029)	TAHAP V(2030)
Penyiapan kebijakan dasar sebagai pondasi dalam mendukung operasional Perencanaan, Riset dan Inovasi daerah yang berkualitas	Mengoptimalkan kualitas walidata, Musrenbang, monev. pembangunan daerah, hasil riset dan inovasi daerah dalam implementasi kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Penguatan perencanaan pembangunan daerah berbasis bukti (evidence based policy)	Memperkokoh perencanaan pembangunan daerah berbasis bukti (evidence based policy)	Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2025 (diolah)

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan dalam strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Berdasarkan penjelasan diatas dan dengan berpedoman pada rumusan keterkaitan antara visi dan misi, rumusan tujuan dan sasaran dalam RPJMD dengan Renstra Bappelitbangda terlihat bahwa sinergitas misi dan program prioritas yang selaras dengan tugas, fungsi dan peran Bappelitbangda Kota Ternate. Penyajian strategi dan arah kebijakan dapat dilihat dalam berikut :

Tabel 3.3
Strategi dan Arah Kebijakan Renstra

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi PD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	Ket.
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Memantapkan Sikronisasi Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Mengoptimalkan Sikronisasi Perencanaan kinerja, Kinerja penganggaran, Pelaksanaan kinerja serta Pengendalian dan evaluasi kinerja	1. Peningkatan SDM dalam memahami dan mengelola proses perencanaan, penganggaran, Pelaksanaan dan Pengendalian rencana pembangunan daerah	
			2. Keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah, prov. dan nasional untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas	

Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Strategi PD	Arah Kebijakan RENSTRA PD	Ket.
			3. Penggunaan Sistem Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian yang Terintegrasi untuk memperkuat konsistensi antar tahapan	
			3. Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang smart, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja	
			4. Peningkatan koordinasi dengan Perangkat daerah, Pemerintah Provinsi dan pusat serta pemangku kepentingan lainnya dalam kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5. Peningkatan kualitas analisis monev. untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merumuskan rekomendasi perbaikan dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah	
		Mengoptimalkan inovasi daerah dalam Peningkatan pendapatan daerah, pelayanan dan kesejahteraan Masyarakat	1. Mengoptimalkan hasil riset dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah	
			2. Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2025 (diolah)

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program/kegiatan indikatif sesuai dengan bidang urusan pemerintahan selama periode lima tahun, yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate. Penetapan program/kegiatan disesuaikan dengan Misi Pembangunan Daerah yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun ke depan. Indikasi rencana program membutuhkan pendanaan yang proporsional sesuai tingkat urgensi program, yang pengelolaannya lebih transparan dan akuntabel, memberikan manfaat optimal serta dapat mewujudkan target pembangunan yang telah

ditetapkan. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun Indikator Kinerja merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate Tahun 2025-2029, serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan. Penetapan indikator kinerja dan capaian dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional dan memperhitungkan waktu pencapaian.

Program dan kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan yang akan dilaksanakan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate. Urusan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 2019, termasuk dalam fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Lebih jauh akan diuraikan rencana program, kegiatan, dan pendanaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Program, Kegiatan, Sub kegiatan RENSTRA Bappelitbangda

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program dan Kegiatan	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Ket.
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja pemerintah	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja pemerintah				SAKIP			
		Peningkatan Komponen Perencanaan Kinerja Dalam Nilai SAKIP			Komponen Kinerja Perencanaan (Bobot 30%)			
			Meningkatnya Nilai SAKIP Bappelitbangda		SAKIP Bappelitbangda	5.01.01..	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program dan Kegiatan	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Ket.
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	5.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	5.01.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program dan Kegiatan	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Ket.
					Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		SKPD	
				Terpenuhinya Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Bimtek Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Bimtek Peraturan Perundang-Undangan	5.01.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya Paket Penyediaan administrasi Umum	Jumlah Paket Penyediaan administrasi Umum	5.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program dan Kegiatan	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Ket.
					yang Disediakan			
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5. 01. 01. 2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5. 01. 01. 2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5. 01. 01. 2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5. 01. 01. 2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5. 01. 01. 2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedianya BMD	Jumlah BMD yang Disediakan	5. 01. 01. 2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5. 01. 01. 2.07. 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	5. 01. 01. 2.07. 0005	Penggandaan Mebel	
					Jumlah Unit	5. 01. 01. 2.07.	Pengadaan Peralatan dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program dan Kegiatan	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Ket.
					Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0006	Mesin Lainnya	
				Tersedianya Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpenuhi BMD yang Dipelihara	Jumlah BMD yang Dipelihara	5.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5.01.01.2.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program dan Kegiatan	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Ket.
					yang Dipelihara/ Direhabilitasi	0009	Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia		Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia	5. 01. 02. .	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam		Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam			
			Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Ditetapkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Ditetapkan	5. 01. 02. 2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan	5. 01. 02. 2.01. 0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Daerah Pembangunan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program dan Kegiatan	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Ket.
					Teknokratik)			
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	
					Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/kota	
					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan	5.01.02.2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program dan Kegiatan	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Ket.
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	5. 01. 02. 2.02. 0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5. 01. 02. 2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5. 01. 02. 2.03. 0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5. 01. 02. 2.03. 0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
				Tersedianya Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	5. 01. 02. 2.04.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	5. 01. 02. 2.04. 0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program dan Kegiatan	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Ket.
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia		Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5. 01. 03. .	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam		Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5. 01. 03. 2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program dan Kegiatan	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Ket.
				Pembangunan Manusia				
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Tersedianya Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program dan Kegiatan	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Ket.
				Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program dan Kegiatan	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Ket.
				Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program dan Kegiatan	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Ket.
					Bidang Infrastruktur		Bidang Infrastruktur	
		Peningkatan Inovasi Daerah			Indeks Inovasi Daerah			
			Meningkatnya Hasil Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	5. 05. 02. .	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				Tersedianya Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	5. 05. 02. 2.02.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	5. 05. 02. 2.02. 0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	5. 05. 02. 2.02. 0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	5. 05. 02. 2.02. 0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program dan Kegiatan	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Ket.
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	5.05.02.2.02.0004	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.05.02.2.02.0007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.05.02.2.02.0008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	5.05.02.2.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
				Tersedianya	Jumlah Dokumen Hasil	5.05.02.	Penelitian dan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program dan Kegiatan	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Ket.
				Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2.03.	Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	5.05.02.2.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber daya	5.05.02.2.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber daya Mineral	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program dan Kegiatan	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Ket.
					Mineral			
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	5.05.02.2.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	5.05.02.2.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	5.05.02.2.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	
				Tersedianya Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.2.04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Laporan Hasil	5.05.02.	Diseminasi Jenis, Prosedur	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program dan Kegiatan	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Ket.
					Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	2.04.0003	dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
			Meningkatnya Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	5.05.03..	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
				Tersedianya laporan Invensi dan Inovasi	Jumlah laporan Invensi dan Inovasi	5.05.03.2.02.	Invensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2025 (diolah)

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan RENSTRA Bappelitbangda

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Ket.
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					2023	2024	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya akuntabilitas Kinerja pemerintah				SAKIP	B	B	B		BB		BB		BB		BB		BB		
	Peningkatan Komponen Perencanaan Kinerja Dalam Nilai SAKIP			Komponen Kinerja Perencanaan (Bobot 30%)	19,3	19,77	20,21		20,77		21,44		21,69		22,2		22,63		
		5. 01. 01. .	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SAKIP Bappelitbangda	BB	BB	BB	8.595.683.185	BB	9.081.513.034	BB	9.031.513.034	A	8.981.513.034	A	9.056.513.034	A	9.056.513.034	
		5. 01. 01. 2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	7 Dokumen	44.999.163	9 Dokumen	52.500.000	9 Dokumen	52.500.000	9 Dokumen	52.500.000	9 Dokumen	52.500.000	9 Dokumen	52.500.000	
		5. 01. 01. 2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	17.499.567	5 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000	
		5. 01. 01. 2.01. 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	7.499.826	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	1 Dokumen	7.500.000	
		5. 01. 01. 2.01. 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	4.999.829	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	
		5. 01. 01. 2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	7.499.960	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	7.500.000	
		5. 01. 01. 2.01. 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	7.499.982	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	7.500.000	
		5. 01. 01. 2.01. 0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	0	0	0	-	0	-	3 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	15.000.000	
		5. 01. 01. 2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.986.730.109	1 Laporan	5.005.000.000	1 Laporan	5.005.000.000	1 Laporan	5.005.000.000	1 Laporan	5.005.000.000	1 Laporan	5.005.000.000	
		5. 01. 01. 2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 orang	45 orang	49 orang	4.981.730.280	49 orang	5.000.000.000	49 orang	5.000.000.000	49 orang	5.000.000.000	49 orang	5.000.000.000	49 orang	5.000.000.000	
		5. 01. 01. 2.02. 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.999.829	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Ket.
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					2023	2024	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		5. 01. 01. 2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi & Bimtek Peraturan Perundang-Undangan	204 Orang	205 Orang	0	-	200 Orang	200.000.000	5 Orang	60.000.000	5 Orang	60.000.000	5 Orang	60.000.000	5 Orang	60.000.000	
		5. 01. 01. 2.05. 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200 Orang	200 Orang	0	-	200 Orang	200.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	
		5. 01. 01. 2.05. 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	4 Orang	5 Orang	0	-	0	-	5 Orang	60.000.000	5 Orang	60.000.000	5 Orang	60.000.000	5 Orang	60.000.000	
		5. 01. 01. 2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Penyediaan administrasi Umum	5 Paket	5 Paket	4 Paket	802.534.554	5 Paket	641.513.034	5 Paket	656.513.034	5 Paket	666.513.034	5 Paket	681.513.034	5 Paket	641.513.034	
		5. 01. 01. 2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	9.968.125	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	
		5. 01. 01. 2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	49.998.729	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	1 Paket	50.000.000	
		5. 01. 01. 2.06. 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket		1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000	
		5. 01. 01. 2.06. 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	149.976.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	1 Paket	150.000.000	
		5. 01. 01. 2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	319.779.700	1 Paket	120.000.000	1 Paket	120.000.000	1 Paket	120.000.000	1 Paket	120.000.000	1 Paket	120.000.000	
		5. 01. 01. 2.06. 0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	24.750.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	
		5. 01. 01. 2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	248.062.000	1 Laporan	256.513.034	1 Laporan	271.513.034	1 Laporan	281.513.034	1 Laporan	296.513.034	1 Laporan	256.513.034	
		5. 01. 01. 2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang Disediakan	6 Unit	10 Unit	0	-	2 Unit	35.000.000	6 Unit	155.000.000	4 Unit	95.000.000	6 Unit	155.000.000	4 Unit	95.000.000	
		5. 01. 01. 2.07. 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	0	0	0	0	-	2 Unit	60.000.000	0		2 Unit	60.000.000	0	-	
		5. 01. 01. 2.07. 0005	Penggandaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	1 Paket	0	0	0	0	-	2 Unit	60.000.000	2 Unit	60.000.000	2 Unit	60.000.000	2 Unit	60.000.000	
		5. 01. 01. 2.07. 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	10 Unit	0	-	2 Unit	35.000.000	2 Unit	35.000.000	2 Unit	35.000.000	2 Unit	35.000.000	2 Unit	35.000.000	
		5. 01. 01. 2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	2.609.560.560	15 Laporan	2.900.000.000	15 Laporan	2.900.000.000	15 Laporan	2.900.000.000	15 Laporan	2.900.000.000	15 Laporan	2.900.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Ket.
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					2023	2024	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	363.020.560	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	300.000.000	3 Laporan	300.000.000	
		5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2.246.540.000	12 Laporan	2.600.000.000	12 Laporan	2.600.000.000	12 Laporan	2.600.000.000	12 Laporan	2.600.000.000	12 Laporan	2.600.000.000	
		5.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang Dipelihara	8 Unit	7 Unit	7 Unit	151.858.800,00	7 Unit	247.500.000	8 Unit	202.500.000	8 Unit	202.500.000	8 Unit	202.500.000	8 Unit	302.500.000	
		5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	2 Unit	77.500.000,00	2 Unit	77.500.000	2 Unit	77.500.000	2 Unit	77.500.000	2 Unit	77.500.000	2 Unit	77.500.000	
		5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	5 Unit	74.358.800,00	5 Unit	170.000.000	5 Unit	75.000.000	5 Unit	75.000.000	5 Unit	75.000.000	5 Unit	75.000.000	
		5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	0	0	-	0	-	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	150.000.000	
		5.01.02..	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia	86,30%	86,87%	87%	4.184.857.011	90%	2.727.486.966	92%	2.727.486.966	94%	2.927.486.966	96%	3.077.486.966	97%	3.702.486.966	
	Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam			88,25%	89,36%	90%	92%		94%		96%		97%						
	Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			85,72%	86,18%	87%	90%		92%		94%		96%		97%				
		5.01.02.2.01.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang Ditetapan	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.879.952.543,40	2 Dokumen	1.255.000.000	2 Dokumen	1.255.000.000	2 Dokumen	1.355.000.000	2 Dokumen	1.505.000.000	3 Dokumen	2.080.000.000	
		5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Daerah Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	1 Dokumen	1 Dokumen	0	-	0		0		1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	100.000.000	
		5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	199.953.211	1 Berita Acara	100.000.000	1 Berita Acara	100.000.000	1 Berita Acara	100.000.000	1 Berita Acara	100.000.000	2 Berita Acara	200.000.000	
		5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	2 Berita Acara	2 Berita Acara	399.999.909	1 Berita Acara	225.000.000	1 Berita Acara	225.000.000	1 Berita Acara	225.000.000	1 Berita Acara	225.000.000	2 Berita Acara	400.000.000	
		5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	1 Berita Acara	2 Berita Acara	399.999.796	1 Berita Acara	250.000.000	1 Berita Acara	250.000.000	1 Berita Acara	250.000.000	1 Berita Acara	250.000.000	2 Berita Acara	400.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif											Ket.	
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					2023	2024	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		5. 01. 02. 2.01. 0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	627 Usulan	615 Usulan	600 Usulan	274.999.750	600 Usulan	280.000.000	600 Usulan	280.000.000	600 Usulan	280.000.000	600 Usulan	280.000.000	600 Usulan	280.000.000	
		5. 01. 02. 2.01. 0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	604.999.878	2 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	400.000.000	2 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	700.000.000	
		5. 01. 02. 2.02.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.101.600.000	1 Dokumen	550.800.000	1 Dokumen	550.800.000	1 Dokumen	650.800.000	1 Dokumen	650.800.000	1 Dokumen	700.800.000	
		5. 01. 02. 2.02. 0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.101.600.000	1 Dokumen	550.800.000	1 Dokumen	550.800.000	1 Dokumen	550.800.000	1 Dokumen	550.800.000	1 Dokumen	550.800.000	
		5. 01. 02. 2.02. 0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	0	-	0	-	0	-	1 Buku	100.000.000	1 Buku	100.000.000	1 Buku	150.000.000	
		5. 01. 02. 2.03.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	928.910.514	3 Laporan	721.686.966	3 Laporan	721.686.966	3 Laporan	721.686.966	3 Laporan	721.686.966	3 Laporan	721.686.966	
		5. 01. 02. 2.03. 0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	99.994.560	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	100.000.000	
		5. 01. 02. 2.03. 0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	828.915.954	3 Laporan	621.686.966	3 Laporan	621.686.966	3 Laporan	621.686.966	3 Laporan	621.686.966	3 Laporan	621.686.966	
		5. 01. 02. 2.04.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	3 Dokumen	0	3 Dokumen	274.393.953	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	200.000.000	
		5. 01. 02. 2.04. 0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	3 Dokumen	0	3 Dokumen	274.393.953	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	200.000.000	3 Dokumen	200.000.000	
		5. 01. 03. .	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	36,21%	35,21%	65%	1.464.794.072,30	70%	1.070.000.000	75%	1.070.000.000	80%	1.070.000.000	85%	1.070.000.000	90%	1.070.000.000	
				Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	39,24%	37,23%	65%		70%		75%		80%		85%		90%		

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Ket.
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					2023	2024	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
				Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Wilayah	32,54%	33,54%	65%		70%		75%		80%		85%		90%		
		5.01.03.2.01.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	587.146.827,60	2 Dokumen	430.000.000	2 Dokumen	430.000.000	2 Dokumen	430.000.000	2 Dokumen	430.000.000	3 Dokumen	430.000.000	
		5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	149.998.826	2 Dokumen	130.000.000	2 Dokumen	130.000.000	2 Dokumen	130.000.000	2 Dokumen	130.000.000	3 Dokumen	130.000.000	
		5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	72.718.024	2 Laporan	65.000.000	2 Laporan	65.000.000	2 Laporan	65.000.000	2 Laporan	65.000.000	2 Laporan	65.000.000	
		5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	114.984.336,00	1 Laporan	85.000.000	1 Laporan	85.000.000	1 Laporan	85.000.000	1 Laporan	85.000.000	1 Laporan	85.000.000	
		5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	249.445.642,50	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	150.000.000	2 Laporan	150.000.000	3 Laporan	150.000.000	
		5.01.03.2.02.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	452.835.686	2 Dokumen	325.000.000	2 Dokumen	325.000.000	2 Dokumen	325.000.000	2 Dokumen	325.000.000	3 Dokumen	325.000.000	
		5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	101.328.491	2 Dokumen	85.000.000	2 Dokumen	85.000.000	2 Dokumen	85.000.000	2 Dokumen	85.000.000	3 Dokumen	85.000.000	
		5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	196.537.471	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	100.000.000	3 Laporan	100.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Ket.
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					2023	2024	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		5. 01. 03. 2.02. 0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	79.998.861	1 Laporan	65.000.000	2 Laporan	65.000.000	2 Laporan	65.000.000	2 Laporan	65.000.000	3 Laporan	65.000.000	
		5. 01. 03. 2.02. 0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	74.970.862	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	75.000.000	
		5. 01. 03. 2.03.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	424.811.559	2 Dokumen	315.000.000	2 Dokumen	315.000.000	2 Dokumen	315.000.000	2 Dokumen	315.000.000	3 Dokumen	315.000.000	
		5. 01. 03. 2.03. 0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	99.999.611	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	75.000.000	2 Dokumen	75.000.000	3 Dokumen	75.000.000	
		5. 01. 03. 2.03. 0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	74.999.811	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	2 Laporan	50.000.000	3 Laporan	50.000.000	
		5. 01. 03. 2.03. 0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	99.999.835	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	65.000.000	
		5. 01. 03. 2.03. 0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	3 Laporan	149.812.302	2 Laporan	125.000.000	2 Laporan	125.000.000	2 Laporan	125.000.000	2 Laporan	125.000.000	3 Laporan	125.000.000	
	Peningkatan Inovasi Daerah			Indeks Inovasi Daerah	43,6	53,58	60		62,5		65		67,5		70		75		
		5. 05. 02. .	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	85,80%	95,35%	95,50%	1.384.602.407	95,75%	971.000.000	96,00%	1.171.000.000	96,25%	1.271.000.000	96,50%	1.271.000.000	97,00%	1.371.000.000	
		5. 05. 02. 2.02.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	4 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	299.184.543	3 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	450.000.000	3 Dokumen	450.000.000	3 Dokumen	450.000.000	3 Dokumen	550.000.000	
		5. 05. 02. 2.02. 0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	0	0	0	-	1 Dokumen	100.000.000	0	-	0	-	1 Dokumen	150.000.000	0	-	

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Ket.
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					2023	2024	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		5. 05. 02. 2.02. 0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	-	0	-	1 Dokumen	150.000.000	0	-	0	-	1 Dokumen	200.000.000	
		5. 05. 02. 2.02. 0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99.438.310	0	-	0	-	1 Dokumen	150.000.000	0	-	-	-	
		5. 05. 02. 2.02. 0004	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	0	0	0	-	0	-	1 Dokumen	150.000.000	0	-	0	-	0	-	
		5. 05. 02. 2.02. 0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen	0	-	1 Dokumen	100.000.000	0	-	0	-	1 Dokumen	150.000.000	-	-	
		5. 05. 02. 2.02. 0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0	0	0	-	0	-	1 Dokumen	150.000.000	0	-	0	-	1 Dokumen	200.000.000	
		5. 05. 02. 2.02. 0007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	0	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	150.000.000	0	-	0	-	
		5. 05. 02. 2.02. 0008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	150.000.000	0	-	
		5. 05. 02. 2.02. 0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	0	1 Dokumen	1 Dokumen	99.778.933	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	150.000.000	
		5. 05. 02. 2.02. 0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99.967.300	1 Dokumen	100.000.000	0	-	1 Dokumen	150.000.000	0	-	0	-	
		5. 05. 02. 2.03.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	10 Dokumen	7 Dokumen	4 Dokumen	699.959.230	3 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	350.000.000	3 Dokumen	450.000.000	3 Dokumen	450.000.000	3 Dokumen	450.000.000	
		5. 05. 02. 2.03. 0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	1 Dokumen	1 Dokumen	99.999.035	1 Dokumen	100.000.000	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	150.000.000	
		5. 05. 02. 2.03. 0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	99.993.455	1 Dokumen	100.000.000	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	150.000.000	
		5. 05. 02. 2.03. 0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0	-	0	-	1 Dokumen	100.000.000	0	-	0	-	0	-	

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Ket.
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					2023	2024	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	499.966.740,00	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	150.000.000	0	-	
		5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	-	1 Dokumen	100.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	
		5.05.02.2.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber daya Mineral	0	0	0	-	0	-	1 Dokumen	150.000.000							
		5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	0	0	-	0	-	1 Dokumen	100.000.000	0	-	0	-	0	-	
		5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	150.000.000	0	-	0	-	
		5.05.02.2.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	150.000.000	0	-	0	-	
		5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1 Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	150.000.000	0	-	
		5.05.02.2.03.0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	1 Dokumen	1 Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	150.000.000	0	-	
		5.05.02.2.03.0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	1 Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	1 Dokumen	150.000.000	0	-	1 Dokumen	150.000.000	
		5.05.02.2.04.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	3 Laporan	3 Laporan	2 Laporan	385.458.634,00	2 Laporan	371.000.000	2 Laporan	371.000.000	2 Laporan	371.000.000	2 Laporan	371.000.000	2 Laporan	371.000.000	
		5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	240.002.143	1 Laporan	225.000.000	1 Laporan	225.000.000	1 Laporan	225.000.000	1 Laporan	225.000.000	1 Laporan	225.000.000	
		5.05.02.2.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	145.456.491	1 Laporan	146.000.000	1 Laporan	146.000.000	1 Laporan	146.000.000	1 Laporan	146.000.000	1 Laporan	146.000.000	
		5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan	1 Laporan	0	-	0	-									

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran program dan Kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan		Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Ket.
							2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					2023	2024	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		5. 05. 03. .	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah /Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	17,07%	4,00%	18,73%	0	19,49%	150.000.000	20,27%	150.000.000	21,09%	150.000.000	21,95%	150.000.000	22,84%	150.000.000	
		5. 05. 03. 2.02.	Invensi dan Inovasi	Jumlah laporan Invensi dan Inovasi	0	0	0%	-	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	
		5. 05. 03. 2.02. 0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	0	0	0%	-	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	150.000.000	

Dalam rangka mencapai sasaran kinerja pelayanan unsur penunjang urusan pemeritahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan, maka ditetapkan indikator kinerja Utama dan indicator kinerja kunci yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda

No	Indikator	Sat.	Target						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	SAKIP	Kategori	B	BB	BB	BB	BB	BB	

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2025 (diolah)

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci Bappelitbangda

No	Indikator	Sat.	Target						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	SAKIP Bappelitbangda	Katagori	BB	BB	BB	A	A	A	
2	Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia	%	87	90	92	94	96	97	
3	Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	%	90	92	94	96	97	98	
4	Presentase Capaian Kinerja Program Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	87	90	92	94	96	97	

No	Indikator	Sat.	Target						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
5	Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	65	70	75	80	85	90	
6	Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%	65	70	75	80	85	90	
7	Persentase Keselarasan Target Kinerja dan Anggaran RENJA-PD dengan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	65	70	75	80	85	90	
8	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	%	95,50	95,75	96,00	96,25	96,50	97,00	
9	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	18,73	19,49	20,27	21,09	21,95	22,84	

Sumber: Bappelitbangda Kota Ternate, 2025 (diolah)

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi dan misi daerah, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Ternate Tahun 2025-2029 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate.

7.1. Program Transisi

Masa jabatan Walikota Ternate akan berakhir tahun 2029. Selang antara masa berakhir jabatan Walikota dengan pelaksanaan Pilkada, terjadi masa transisi

kepemimpinan Pemerintah Kota Ternate, dimana *carrataker* akan menjalankan kepemimpinan transisi sambil menyiapkan pelaksanaan Pilkada.

Masa transisi ini, pelaksanaan pembangunan tetap berjalan secara simultan dan *sustainable* sesuai aspirasi masyarakat yang berkembang sebagaimana yang dituangkan dalam hasil Musyawarah Rencana Pembangunan menjelang penyusunan RPJMD Kota Ternate yang baru maupun Renstra PD yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota sebagai dokumen perencanaan yang memadukan sistem *top-down* dan *bottom-up*. Untuk itu hal-hal yang perlu dilaksanakan antara lain :

1. Melaksanakan pembangunan yang belum terselesaikan pada kurun waktu 2025-2029 sesuai dengan RPJMD Kota Ternate dan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang telah ditetapkan.
2. Menyempurnakan hasil evaluasi pembangunan yang dianggap perlu.
3. Mempersiapkan penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate yang baru sesuai dengan ketentuan RPJMD Kota Ternate yang baru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menjalankan tupoksi dan rutinitas pelayanan publik sesuai dengan arah kebijakan pemerintah daerah yang telah ditetapkan dan disepakati.

7.2. Kaidah Pelaksanaan

1. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate ini disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Ternate Tahun 2025-2029, dan merupakan acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate.

3. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Ternate Tahun 2025–2029 merupakan pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada *stakeholders* yang ada.
4. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun dan pencapaian kinerja.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate telah tersusun sebagai salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah.

Dengan demikian, Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

**Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Ternate**



Mohd. Taufik Djauhar, S.E., M.Si
NIP. 196602081989021001



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TERNATE
NOMOR : 80.1/III.2/KT/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA TERNATE TAHUN 2025 – 2029

WALI KOTA TERNATE,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dijelaskan bahwa dalam rangka persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Ternate Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

SKPD	BAG. HUKUM
A	

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2025 nomor 234);
6. Peraturan Wali kota Ternate Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2024 nomor 603), sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Ternate Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2025 Nomor 617);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025 – 2029.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Ternate Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

SKPD	BAG. HUKUM
	

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan orientasi mengenai Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Ternate 2025-2029;
 - b. penyusunan Agenda Kerja Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Ternate 2025-2029;
 - c. melakukan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pada masing-masing Perangkat Daerah sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan Dokumen; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Ternate.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Pimpinan Perangkat Daerah membuat surat tugas pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan keanggotaan sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Ternate.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 3 Maret 2025

WALI KOTA TERNATE,

M. TAUNID SOLEMAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kota Ternate di Ternate;
2. Inspektur Kota Ternate di Ternate;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate di Ternate;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate di Ternate
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

SKPD	BAG. HUKUM
	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TERNATE

NOMOR : 80.1 /III.2/KT/2025

TANGGAL : 3 Maret 2025

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KOTA TERNATE
TAHUN 2025 – 2029.

DAFTAR : SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2025-2029

- I. Pembina : Sekretaris Daerah Kota Ternate
- II. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate
- III. Ketua : Para Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Ternate
- IV. Sekretaris : Para Sekretaris Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate
- V. Anggota : Pejabat atau Tim Teknis yang membidangi Penyusunan Dokumen Perencanaan pada masing-masing Pejabat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate



SKPD	BAG. HUKUM
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>